

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelum adanya penelitian ini, penelitian tersebut berkaitan dengan *Good Corporate Governance* yang berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* yaitu:

2.1.1 Mahardhika Kurniawati dan Rizal Yaya' (2017)

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance*, Kinerja Keuangan dan Kinerja Lingkungan terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*”. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh ukuran dewan komisaris, independen dewan komisaris, ukuran komite audit, profitabilitas dan kinerja lingkungan pada *Islamic Social Reporting (ISR)* perusahaan yang berada dalam Daftar Efek Syariah (DES). Populasi penelitian ini terdiri dari semua perusahaan di bawah DES yang bergabung dengan peringkat lingkungan PROPER selama 2011-2015. Ada 31 perusahaan yang dipilih sebagai sampel berdasarkan metode *purposive sampling*. Metode yang digunakan untuk mengukur Pengungkapan ISR adalah dengan menilai item pengungkapan sosial dalam laporan tahunan perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan komisaris, profitabilitas dan kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR perusahaan yang termasuk dalam DES. Sedangkan variabel independensi dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *ISR* perusahaan yang termasuk dalam DES.

Perbedaan penelitian Mahardhika Kurniawati dan Rizal Yaya' (2017) dengan peneliti saat ini adalah pada variabel bebas yaitu Kinerja Lingkungan. Populasi penelitian ini terdiri dari semua perusahaan di bawah DES yang bergabung dengan peringkat lingkungan PROPER selama 2011-2015. Persamaan dengan penelitian ini yaitu teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling dan variabel terikat (*Islamic Sosial Reporting*).

2.1.2 Puji Lestari (2013)

Penelitian yang berjudul “Determinants Of Islamic Social Reporting In Syariah Banks : Case Of Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Islamic Social Reporting pada bank syariah di Indonesia. Elemen Good Corporate Governance yang digunakan yaitu proporsi komisaris independen dan karakteristik perusahaan berupa ukuran perusahaan, profitabilitas dan umur perusahaan. Populasi dari penelitian ini adalah 18 bank syariah di Indonesia periode 2010-2011. penelitian ini menganalisis laporan tahunan perusahaan dengan metode *content analysis*. Teknik analisis ini menggunakan analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Sedangkan umur perusahaan dan proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

Perbedaan penelitian Puji Lestari (2013) dengan penelitian saat ini adalah pada variabel bebas yaitu ukuran perusahaan dan umur perusahaan. Populasi dan

total sampel sebanyak 18 bank syariah di Indonesia. Persamaan dengan peneliti variabel bebas yaitu profitabilitas dan variabel terikat *islamic social reporting*.

2.1.3 Nindya Tyas Hasanah, Novi Wulandari Widiyanti dan Sudarno (2017)

Penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh GCG dan Kinerja Keuangan Terhadap Pengungkapan *Islamic Sosial Reporting* (ISR)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh *good corporate governance* dan kinerja keuangan terhadap pengungkapan *Islamic Sosial Reporting* (ISR) merupakan indeks pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip syariah. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index selama periode tahun 2011-2015. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 55 perusahaan. Pengungkapan ISR dilakukan dengan cara analisis konten melalui metode skoring dari laporan tahunan perusahaan. Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif dan uji asumsi klasik serta pengujian hipotesis dengan metode regresi linear berganda. Uji Adjusted R^2 , uji F, dan uji t. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit, likuiditas dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan ukuran dewan komisaris dan leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Penelitian Nindya Tyas Hasanah, Novi Wulandari Widiyanti dan Sudarno (2017) memiliki perbedaan dan persamaan dengan peneliti saat ini. Perbedaan penelitian Nindya Tyas Hasanah, Novi Wulandari Widiyanti dan Sudarno (2017) dengan peneliti saat ini adalah periode pengukuran laporan keuangan (2011-2015).

Persamaan dengan peneliti adalah variabel terikat (*Islamic Sosial Reporting*), metode skoring dari laporan tahunan.

2.1.4 Khoirudin, Amirul (2013)

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Elemen *Good Corporate Governance* terhadap Pengungkapan *Islamic Sosial Reporting* pada Perbankan Syariah di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari elemen *Good Corporate Governance* terhadap pengungkapan *Islamic Sosial Reporting* pada perbankan syariah di Indonesia. Elemen *Good Corporate Governance* yang digunakan yaitu ukuran Dewan Komisaris dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah di Indonesia. Total sampel yang diuji sebanyak 10 bank umum syariah yang dipilih dengan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menganalisis laporan tahunan perusahaan dengan metode *content analysis*. Teknik analisis dari penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi kenaikan indeks *Islamic Sosial Reporting* pada tahun 2011. Rata-rata pengungkapan *Islamic Sosial Reporting* yang dilakukan oleh perbankan syariah adalah sebesar 55,20%. Ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas syariah secara simultan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Islamic Sosial Reporting* pada perbankan syariah di Indonesia. Ukuran dewan komisaris terbukti memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Islamic Sosial Reporting* pada perbankan syariah di Indonesia, sedangkan ukuran dewan pengawas syariah tidak terbukti berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Sosial Reporting*.

Perbedaan penelitian Khoirudin, Amirul (2013) dengan peneliti saat ini adalah pada variabel bebas yaitu ukuran dewan pengawas syariah. Populasi dan total sampel yang diuji sebanyak 10 bank umum syariah yang dipilih dengan metode *purposive sampling*. Persamaan dengan penelitian ini yaitu teknik analisis menggunakan analisis deskriptif dan analisis statistik. Salah satu variabel bebas yaitu ukuran dewan komisaris.

2.1.5 Listri Yani, Yeasy Darmayanti & Mukhlizul Hamdi (2018)

Penelitian yang berjudul “Pengaruh mekanisme *Corporate Governance* terhadap Pengungkapan *Islamic Sosial Reporting* (ISR)”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris tentang Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Pengungkapan *Islamic Sosial Reporting* (ISR). Teori dalam penelitian ini yaitu teori legitimasi, teori ini berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Perusahaan yang dimaksud yaitu perbankan, perbankan secara terus menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma sosial masyarakat dimana mereka berada, kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin legitimate.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2013-2017 sebanyak 13 unit perbankan yang terdaftar di Otoritas Jasa keuangan (OJK). Teknik pemilihan sampel menggunakan metode sensus, sehingga diperoleh 65 observasi. Metode analisis yang digunakan adalah uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji analisis regresi linear berganda. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, komite audit, kepemilikan saham manajerial dan dewan pengawas syariah tidak berpengaruh

terhadap pengungkapan *Islamic Sosial Reporting* (ISR), sedangkan dewan komisaris independen dan kepemilikan saham institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic Sosial Reporting* (ISR).

Perbedaan penelitian Listri Yani, Yeasy Darmayanti & Mukhlizul Hamdi (2018) dengan peneliti saat ini adalah pada variabel bebas yaitu kepemilikan saham manajerial dan institusional serta profitabilitas dan likuiditas. Persamaan dengan penelitian ini pada variabel bebas yaitu ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen dan komite audi. Sedangkan variabel terikat yaitu *Islamic Sosial Reporting* (ISR).

2.2 Landasan Teori

Pada bagian ini akan membahas teori - teori yang mendasari dan mendukung penelitian. Penelitian ini akan menjelaskan secara sistematis dari *Islamic Governance*, Kinerja Keuangan serta *Islamic Sosial Reporting* dan dapat diformulasikan hipotesis penelitian melalui kerangka pemikiran.

2.2.1 Teori Agensi

Menurut Jensen & Meekling, teori agensi merupakan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih (*principal*) menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan memiliki kewenangan pembuatan keputusan kepada pihak *agent*. Dalam perusahaan, manajer sebagai *agent* bertanggung jawab kepada para pemilik (*principal*) dengan mengoptimalkan keuntungan perusahaan dan juga memaksimalkan kesejahteraan mereka.

Teori agensi menekankan pentingnya pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga profesional. Tujuan memisahkan antara pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan yaitu agar pemilik mendapatkan keuntungan yang semaksimal dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga profesional (Indreswari, 2013). Terdapat perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal yang memungkinkan agen tidak bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Teori keagenan mampu menjelaskan konflik antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu perusahaan. Konflik tersebut timbul karena adanya perbedaan tujuan dari masing-masing posisi dan kepentingan pihak tersebut terhadap perusahaan.

Selain itu adanya asimetri informasi pada perusahaan antara pihak manajemen dan pihak pemilik juga menimbulkan konflik. Dalam hal ini, prinsip-prinsip dasar pengelolaan perusahaan yang baik diperlukan untuk menghindari konflik tersebut. dalam teori keagenan agar dapat mengatasi konflik antara pihak *agent* dan prinsipal ini dapat menggunakan konsep *Corporate Governance*. *Corporate Governance* yang merupakan sebuah konsep tata kelola perusahaan yang diharapkan untuk memberi keyakinan penuh terhadap para investor atas informasi yang didapatkan sama dan lengkap seperti manajemen (Randy & Juniarti, 2013).

Perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik diharapkan mampu mengurangi konflik antar pihak manajer dan pihak pemilik dengan memperkecil asimetri informasi. Pengungkapan secara luas atas perusahaan merupakan salah satu cara agar asimetri informasi tersebut menurun. Pengungkapan yang dilakukan sesuai dengan komposisi dan pola yang sesuai dengan karakteristik pembuat

keputusan (Rahindayati, 2015). Komitmen manajemen dalam meningkatkan kinerja utama dan kinerja sosial diwujudkan dalam pengungkapan tanggungjawab sosial. Pengungkapan tanggungjawab sosial sendiri merupakan perluasan dari pengungkapan informasi atas laporan keuangan.

2.2.2 Teori Legitimasi

Teori legitimasi (Legitimacy theory) berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari masyarakat sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial masyarakat karena kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin legitimate.

Menurut Dowling dan Pfeffer (1975), legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan.

Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa hal yang mendasari teori legitimasi adalah kontrak sosial antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Shocker dan Sethi (1973) memberikan penjelasan tentang kontrak sosial, yaitu : Semua institusi sosial tidak terkecuali perusahaan beroperasi di masyarakat melalui kontrak sosial, baik eksplisit maupun implisit, dimana kelangsungan hidup pertumbuhannya didasarkan pada hasil akhir yang secara sosial dapat diberikan kepada masyarakat luas dan distribusi manfaat ekonomi, sosial atau politik kepada kelompok sesuai dengan power yang dimiliki.

Deegan dan Tobin (2002) menyatakan bahwa legitimasi perusahaan akan diperoleh, jika terdapat kesamaan antara hasil dengan yang diharapkan oleh masyarakat dari perusahaan, sehingga tidak ada tuntutan dari masyarakat. Perusahaan dapat melakukan pengorbanan sosial sebagai refleksi dari perhatian perusahaan terhadap masyarakat.

Dalam lingkungan masyarakat, nilai-nilai sosial selalu berkembang seiring berjalannya waktu, untuk itu perusahaan diharapkan selalu menyesuaikan nilai-nilai yang dimilikinya dengan nilai-nilai lingkungan masyarakat agar tidak terjadi legitimasi gap antara keduanya. “Legitimasi gap dapat terjadi karena dua alasan. Pertama : ada perubahan dalam kinerja perusahaan tetapi harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan tidak berubah, kedua : kinerja perusahaan berubah namun harapan masyarakat terhadap kinerja perusahaan berubah kearah yang berbeda” (Ghozali dan Chariri, 2007).

Organisasi perusahaan harus mengkomunikasikan aktivitas lingkungan dengan melakukan pengungkapan lingkungan sosial (Barhelot dan Robert, 2011). Pengungkapan lingkungan dinilai bermanfaat untuk memulihkan, meningkatkan dan mempertahankan legitimasi yang telah diterima (Hadjoh dan Sukartha, 2013).

2.2.3 Tata Kelola Islami

Sharia Governance adalah hal yang fundamental bagi seluruh lembaga keuangan islam dan tidak kalah penting daripada corporate governance pada tiap institusi. Karena GSG juga bagian dari GCG yang dikhususkan untuk lembaga keuangan islam. Hal tersebut adalah suatu mekanisme untuk dapat mengukur tingkat kepatuhan syariah setiap lembaga keuangan islam. Peran sharia governance

untuk memastikan kepercayaan stakeholders terhadap suatu lembaga keuangan Islam. Selain itu, sejarah telah menunjukkan bahwa peningkatan aspek *sharia compliance* dapat membantu percepatan pertumbuhan industri keuangan Islam.

Pembahasan dalam konteks industri perbankan, tata kelola perusahaan yang baik adalah sesuatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip tentang keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan keadilan (*fairness*).

2.2.4 Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran Dewan Komisaris yang dimaksud adalah jumlah anggota Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan (Khoirudin,2013). Ukuran Dewan Komisaris diukur dengan menghitung jumlah Dewan Komisaris yang ada pada perusahaan tersebut. berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomer 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Komposisi anggota dewan komisaris harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif tepat dan cepat serta dapat bertindak independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis (KEP-117/M-MBU/2002/ Pasal 16 ayat 1). Wewenang Dewan Komisaris adalah untuk mengawasi dan memberikan petunjuk serta arahan pada pengelola perusahaan. Dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk

menekan manajemen dalam pengungkapan *Corporate Social Reporting* (CSR) dengan wewenang tersebut. Secara umum, Dewan Komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan manajemen laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor. Dewan Komisaris diperbolehkan memiliki akses pada informasi perusahaan untuk mengatasinya. Dewan Komisaris tidak memiliki otoritas dalam perusahaan, maka Dewan Direksi bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait dengan kepada Dewan Komisaris (Khoirudin, 2013). Dikarenakan Dewan Komisaris tidak memiliki otoritas dalam suatu perusahaan maka Dewan Direksi mendapatkan informasi dari Dewan Direksi.

Berdasarkan UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007, pasal 108 ayat (5) dijelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk perseroan terbatas, maka wajib memiliki paling sedikitnya 2 (dua) anggota Dewan Komisaris. Oleh karena itu, jumlah Dewan Komisaris dalam tiap perusahaan berbeda-beda jumlahnya karena harus menyesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Hal ini hanya diwajibkan setiap perusahaan memiliki paling sedikit dua anggota Dewan Komisaris, tidak ada ketentuan untuk batas maksimum.

2.2.5 Komite Audit

Komite audit didefinisikan sebagai berikut:

1. Komite Audit adalah suatu komite yang berpandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen.
2. Komite Audit adalah suatu komite yang anggotanya merupakan anggota dewan komisaris terpilih yang pertanggungjawabannya antara lain: membantu menetapkan auditor independen terhadap usulan manajemen. Kebanyakan komite audit terdiri dari 3 sampai 37 dengan 5 bahkan terkadang sampai 7 orang yang bukan merupakan bagian manajemen perusahaan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa komite audit merupakan suatu kelompok yang sifatnya independen dan diangkat secara khusus serta memiliki pandangan antara lain yang terkait dengan sistem pengawasan internal perusahaan.

Dewan komite audit bertugas memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, pelaporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal, serta auditor independen (FCGI, 2000). Tugas komite audit antara lain:

1. Melakukan penelaah atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaah atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
3. Melakukan penelaah atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.

4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.
5. Melakukan penelaah dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten.
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan rahasia perusahaan.

2.2.6 Profitabilitas (ROA)

Profitabilitas (*Profitability*) adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba melalui operasional usahanya dengan menggunakan dana aset yang dimiliki oleh perusahaan. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa Profitabilitas (*Profitability*) menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dan mengukur tingkat efisiensi operasional dan efisiensi dalam menggunakan harta yang dimilikinya (Mas'ud, 2008)

Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi setiap tahunnya, memiliki kecenderungan untuk menggunakan modal sendiri dibandingkan dengan menggunakan hutang. Asumsi lain juga menyebutkan dengan *return on asset* yang tinggi, yang berarti bahwa laba bersih yang dimiliki perusahaan tinggi. Oleh karena itu, apabila perusahaan menggunakan hutang yang besar, tidak akan berpengaruh terhadap struktur modal, karena kemampuan perusahaan dalam membayar bunga juga tetap tinggi. Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio-rasio profitabilitas, yaitu *return on assets* (ROA).

$$ROA = \frac{\text{earning after tax}}{\text{total asset}} \times 100\% \dots\dots\dots (1)$$

2.2.7 Likuiditas (FDR)

Menurut Kasmir (2013:110) menjelaskan bahwa “ Likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban tersebut merupakan kewajiban jangka pendek ataupun kewajiban jangka panjang yang sudah jatuh tempo”. Serupa dalam hal tersebut, Rasio likuiditas menurut Fahmi (2014:69) menjelaskan bahwa, “digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek secara tepat waktu. Kewajiban yang harus dipenuhi adalah hutang jangka pendek, serta mengukur apakah operasi perusahaan tidak akan terganggu bila kewajiban jangka pendek ini segera ditagih”. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban saat jatuh tempo. Perusahaan dikatakan liquid apabila mampu menjadikan aktiva menjadi kas penurunan nilai, sehingga perusahaan dapat segera membayar kewajiban agar dapat melanjutkan aktivitas-aktivitas perusahaan. Standar Bank Indonesia untuk rasio ini berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomer: 9/24/DPbS Tahun 2007 adalah 80%-100%. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$FDR = \frac{\text{Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\% \dots \dots \dots (2)$$

2.2.8 Islamic Social Reporting (ISR)

Menurut konsep etika dalam Islam tersebut terbentuk akuntabilitas dalam perspektif ekonomi Islam yaitu pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam ekonomi konvensional, pelaporan

tanggung jawab sosial dikenal sebagai perpanjangan dari sistem pelaporan keuangan yang merefleksikan ekspektasi sosial yang lebih luas sehubungan dengan peran masyarakat dalam ekonomi atau kegiatan bisnis perusahaan. Terkait dengan hal tersebut, Haniffa (2002) berpendapat bahwa pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan pada sistem konvensional hanya berfokus pada aspek material dan moral. Ia menambahkan bahwa seharusnya aspek spiritual juga dijadikan sebagai fokus utama dalam pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan karena para pembuat keputusan Muslim memiliki ekspektasi agar perusahaan mengungkapkan informasi-informasi terbaru secara sukarela guna membantu dalam pemenuhan kebutuhan spiritual mereka. Oleh karena itu, ia memandang bahwa perlu adanya kerangka khusus untuk pelaporan pertanggungjawaban sosial yang sesuai dengan prinsip Islam.

Kerangka tersebut tidak hanya berguna bagi para pembuat keputusan Muslim, tetapi juga berguna bagi perusahaan Islam dalam memenuhi pertanggungjawabannya terhadap *Allah Subhanaahu wa Ta'ala* dan masyarakat. Kerangka ini dikenal dengan sebutan ISR. ISR menggunakan prinsip syariah sebagai landasan dasarnya. Prinsip syariah dalam ISR menghasilkan aspek-aspek material, moral, dan spiritual yang menjadi fokus utama dari pelaporan sosial perusahaan. *Islamic Social Reporting* (ISR) merupakan perluasan dari pelaporan sosial yang tidak hanya berupa keinginan besar dari seluruh masyarakat terhadap peranan perusahaan dalam ekonomi melainkan berkaitan dengan perspektif spiritual (Haniffa, 2002).

Othman, et. al (2009) menyatakan bahwa perhitungan indeks pengungkapan ISR dirumuskan sebagai berikut :

$$ISR = \frac{\text{jumlah item yang diungkapkan}}{\text{jumlah item yang diharapkan diungkapkan}} 100\%$$

Nilai ISR diperoleh dari *annual report* pada Bank Umum Syariah mulai tahun 2015 hingga 2018 dan skala pengukuran nilai ISR menggunakan skala rasio.

2.2.9 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap ISR

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris perusahaan baik berasal dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan (Ujiyanto, 2007). Semakin banyaknya personil yang menjadi dewan komisaris dapat berakibat pada makin buruknya kinerja yang dimiliki perusahaan. Hal tersebut dapat dijelaskan dalam *agency problem* (masalah keagenan) yaitu dengan makin banyaknya anggota dewan komisaris semakin sulit dalam menjalankan perannya, diantaranya kesulitan dalam berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota dewan itu sendiri, kesulitan yang dialami adalah sulitnya menjalankan tugas pengawasan terhadap manajemen perusahaan yang nantinya berdampak pula terhadap kinerja perusahaan yang semakin menurun (Ujiyanto, 2007).

Dewan Komisaris memiliki peran penting karena bertugas melakukan pengawasan terhadap manajemen dan memberikan informasi kepada *stakeholders*, termasuk informasi tentang pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris maka pengawasan yang dilakukan akan semakin baik. Ini dimungkinkan karena dengan pengawasan

yang baik, dewan komisaris dapat meminimalisir informasi yang mungkin disembunyikan oleh manajemen. Khoirudin (2013) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR perbankan syariah di Indonesia. Dewi dan Priyadi (2013) juga menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial.

2.2.10 Pengaruh Komite Audit Terhadap ISR

Komite audit merupakan yang bertugas membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen. Dalam hal pelaporan keuangan, peran dan tanggung jawab komite audit adalah memonitor dan mengawasi audit laporan keuangan dan memastikan agar standar dan kebijaksanaan keuangan yang berlaku terpenuhi, memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar dan kebijaksanaan tersebut dan apakah sudah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota komite audit, serta menilai mutu pelayanan dan kewajaran biaya yang diajukan auditor eksternal.

Komite audit yang efektif harus meningkatkan pengendalian internal dan bertindak untuk mengurangi agency cost, dan sebagai alat pengendalian yang kuat untuk meningkatkan pengungkapan modal intelektual yang memiliki nilai bagi perusahaan. Munculnya komite audit dihubungkan dengan pelaporan keuangan yang lebih terpercaya, peningkatan kualitas dan pengungkapan. Dengan adanya komite audit tentunya terjadinya proses manipulasi laba akan kecil sehingga perusahaan akan mengungkapkan segala hal yang menjadi keharusan seperti, tidak adanya manipulasi laporan keuangan. Ketika manipulasi laporan keuangan tidak

ada maka pengungkapan ISR tentunya akan lebih transparan tanpa adanya manipulasi. 29 Beberapa penelitian telah melaporkan hasil penelitian tentang hubungan komite audit dan kualitas pelaporan keuangan.

Penelitian Handajani.dkk (2009) menunjukkan hasil bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sunarto (2016) bertolak belakang dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Beberapa penelitian cenderung untuk mendukung keberadaan komite audit karena meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

2.2.11 Pengaruh Profitabilitas (ROA) Terhadap ISR

Profitabilitas perusahaan berkaitan dengan teori legitimasi (*legitimacy theory*) karena jika keuntungan yang didapat perusahaan besar akan mendapatkan pengungkapan informasi yang lebih luas. Perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi dari investasi, akan menggunakan hutang yang relatif kecil. Apabila perusahaan ingin tetap hidup untuk dapat tumbuh dan berkembang, maka perusahaan harus memperoleh laba.

Profitabilitas berkaitan erat dengan keefektifan manajemen suatu perusahaan dalam menentukan langkah strategis untuk memperoleh keuntungan. Perusahaan yang memiliki tingkat profit lebih tinggi akan menarik para investor dengan upaya memberikan informasi yang lebih baik kepada masyarakat serta *stakeholders* lainnya yaitu dengan meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi profitabilitas maka pengungkapan ISR akan semakin luas. Profitabilitas yang tinggi berarti bahwa perusahaan akan

semakin fleksibel dan bebas dalam mengelola laba untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial kepada para pemegang kepentingan. Othman *et al.*(2010), Maulida *et al.* (2014) dan Nurkhin (2010) membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial.

2.2.12 Pengaruh Likuiditas (FDR) Terhadap ISR

Likuiditas adalah ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau melunasi hutang-hutang jangka pendeknya. Berdasarkan teori legitimasi berkeyakinan bahwa kekuatan perusahaan yang ditunjukkan rasio likuiditas tinggi akan berhubungan dengan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang tinggi. Hal ini didasarkan bahwa kuatnya keuangan suatu perusahaan akan cenderung memberikan informasi yang luas dari pada perusahaan yang memiliki kondisi keuangan yang lemah.

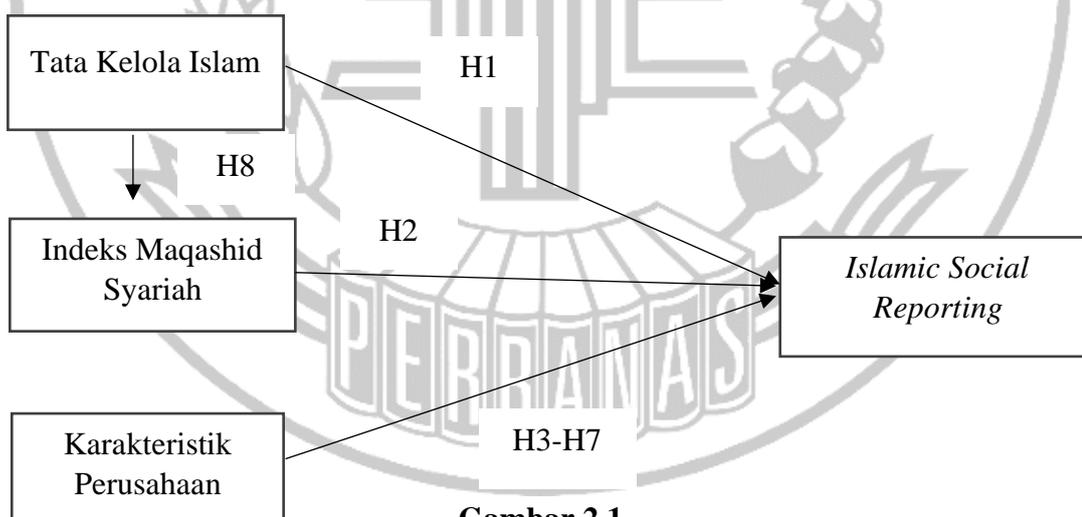
Likuiditas berpengaruh positif terhadap kelengkapan pengungkapan ISR. Penelitian yang dilakukan oleh Hussainey *et. Al* (2011) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara likuiditas dan pengungkapan ISR. Penelitian yang dilakukan Syahrir dan Suhendra (2010) menemukan bahwa likuiditas memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan ISR.

Menurut Wallance dan Naser (1994) berpendapat bahwa likuiditas adalah faktor penting dalam evaluasi perusahaan oleh pihak yang berkepentingan seperti investor, kreditur dan pemerintah setempat. Dari beberapa pendapat dan peneliti sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dengan perusahaan yang memiliki nilai likuiditas yang tinggi akan semakin besar perusahaan dalam membayar tagihannya, dan akan berpengaruh juga terhadap luasnya pengungkapan tanggung jawab sosial.

2.3 Kerangka Pemikiran

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Tata Kelola Islam dan Kinerja Keuangan terhadap *Islamic Social Reporting* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Faktor-faktor yang mempengaruhi *Islamic Social Reporting* dalam kerangka pemikiran penelitian saat ini adalah Tata Kelola Islam yang diwakili Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Kinerja Keuangan yang diwakili Profitabilitas (*Return On Assets*), Likuiditas (*Financing to Deposit Ratio*) apakah berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Berikut ini akan dipaparkan kerangka pemikiran kolaborasi dan kerangka penelitian saat ini :

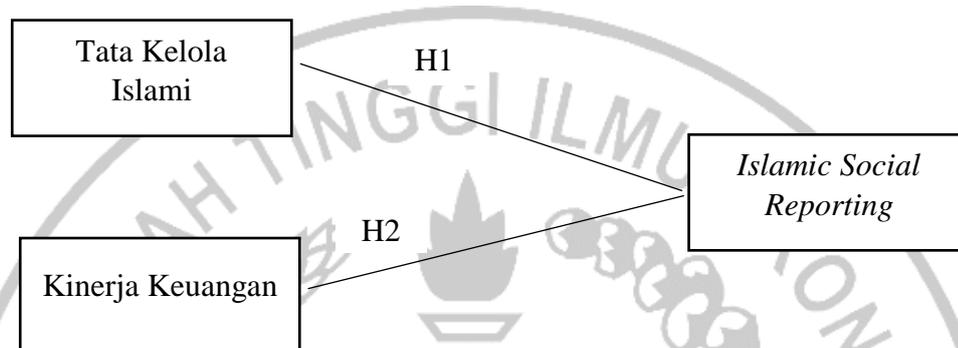


Gambar 2.1

KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN KOLABORASI

Berdasarkan kerangka pemikiran kolaborasi diatas, penelitian kolaborasi dilakukan untuk menguji pengaruh tata kelola islam, indeks maqashid syariah dan karakteristik perusahaan maupun perbankan syariah pada pelaporan sosial islam.

Kerangka pemikiran penelitian kolaborasi diatas juga dilakukan untuk menguji pengaruh tata kelola islam pada indeks maqashid syariah dan karakteristik perusahaan maupun perbankan syariah dilihat dari kinerja keuangan perbankan syariah.



Gambar 2.2
KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN SAAT INI

2.4 Hipotesis Penelitian

Sugiyono (2013) menyatakan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data, hipotesis dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

H₁ : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting*.

H₂ : Komite Audit berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting*.

H₃ : Profitabilitas berpengaruh terhadap *Islamic Social Reporting*

H₄ : Likuiditas berpengaruh terhadap *Islamic Sosial Reporti*